

KONSEPSI *KHILAFAH*
(Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)



Oleh :
SAIFUDDIN
NIM : 05.234.345

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam**

**YOGYAKARTA
2007**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

N a m a : Saifuddin, SHI.
N I M : 05.234.345
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2007
Saya yang menyatakan,

Saifuddin, SHI.
NIM. 05.234.345

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis dari Saifuddin, SHI., NIM 05.234.345 yang berjudul:

KONSEPSI *KHILAFAH* (Studi Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia)

saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat magister dalam Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Agustus 2007

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 150 178 204

ABSTRAK

Saat ini sistem politik *mainstream* yang banyak dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia adalah sistem *nation state*. Sistem ini merupakan sistem politik kenegaraan yang lebih berdasarkan pada kesamaan bangsa bukan berdasarkan kesamaan agama. Sistem ini juga ditandai dengan adanya batas geografis dan teritorial.

Namun demikian seiring munculnya globalisasi. *Nation-state* berada di ambang kehancurannya. Kenichi Ohmae mengatakan bahwa dengan munculnya globalisasi *is the end of nation-state*. Sebetulnya bangkit dan runtuhnya suatu sistem politik merupakan sesuatu yang wajar. Namun sebuah sistem bisa dianggap baik, ideal, dan memiliki *sustainability* yang tinggi apabila dia bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. *Nation-state* baru muncul setelah masa pencerahan Eropa dan baru *established* setelah Perang Dunia II karena *nation-state* merupakan anak kandung kolonialisme dan imperialisme. Dengan demikian, sistem *nation-state* dalam hitungan waktu masih seumur jagung tetapi sudah berada di ambang kehancurannya.

Sistem ***khilafah*** dalam sejarahnya mampu bertahan dalam rentang waktu yang cukup bahkan sangat lama (632 M.-1924 M.). Khusus kaitannya dengan kepentingan umat Islam, hanya sistem ***khilafah*** yang mengakomodasi dan membela kepentingannya. Sistem ***khilafah*** juga merupakan *wasilah* untuk *tatbiq al-syari'ah*.

Dalam merespon konsep *nation-state*, umat Islam terpecah ke dalam dua model pemikiran. Pertama, respon konformis, yaitu menerima konsep *nation-state*, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. Kedua respon non-konformis, yaitu menolak sebagian atau keseluruhan konsep *nation-state*. Biasanya kelompok ini mengajukan konsep Islam untuk menggantikan tawaran konsep *nation-state*, seperti dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu dengan mengajukan konsep ***khilafah***. Mengajukan konsep ***khilafah*** di era modern yang didominasi oleh sistem *nation-state* dan paham demokrasi liberal tentu menjadi sesuatu yang 'aneh' karena seakan-akan menentang arus yang *mainstream* dan dianggap utopis, tetapi hal demikian bukan berarti mustahil, apalagi sistem ***khilafah*** sudah pernah ada dan teraplikasi dalam sejarah. Bukankah siklus waktu selalu berputar bisa jadi sesuatu yang pernah ada dan terukir dalam sejarah akan kembali lagi menghiasi panggung sejarah politik saat ini.

Oleh sebab itu, menurut penyusun meneliti konsep Islam khususnya di sini meneliti pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia tentang ***khilafah*** menjadi sesuatu yang urgen dan bukan sesuatu yang *out of date* dan tidak perlu, justru sebaliknya, merupakan sesuatu yang aktual, *up to date*, dan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk membedah konsep politik HTI mengenai ***khilafah***, mencari dan menemukan alasan strategis baik sosiologis, politis, maupun ideologis mengapa HTI selalu menawarkan konsep ***khilafah*** dalam memecahkan setiap persoalan umat Islam dewasa ini dan apa implikasi konsep tersebut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penyusun menyusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsepsi politik HTI tentang *khilafah*, mengapa HTI selalu mengajukan konsep *khilafah* dalam memecahkan segala persoalan umat Islam dewasa ini, dan bagaimana implikasinya terhadap konsep NKRI.

Rumusan masalah di atas penyusun bedah dengan pisau analisis yang berangkat dari kerangka teoretik. Pertama dalam melihat konsep normatif HTI, penyusun menggunakan pemetaan model pemikiran dalam Islam mengenai ketatanegaraan, yaitu kelompok yang anti terhadap semua yang datang dari Barat. Kelompok yang di samping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian bahwa selain pemurnian, harus pula dipikirkan adaptasi dengan zaman modern dan kelompok sekular. Kemudian untuk melihat HTI secara sosiologis digunakan teori John O. Voll yaitu pendekatan tiga dimensi. Pertama, kepentingan-kepentingan individual dan kelompok harus diidentifikasi, lokalitas harus diperhatikan. Kedua, hubungan gerakan-gerakan Islam yang beraneka ragam dengan dinamika sejarah modern. Ketiga, keadaan Islam sendiri.

Jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah deskriptif-analitis-kritis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-historis-sosiologis.

Dengan menggunakan kerangka teori dan pendekatan di atas diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Sistem pemerintahan Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia adalah *khilafah* yang mengikuti pedoman Nabi (*khilafah 'ala minhaj al-Nubuwwah*). Konsepsi *khilafah* HTI adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam *al-Qur'an, sunnah, ijma'* dan *qiyas*. Konsep tersebut termanifestasi secara ideal pada masa *al-Khulafah al-Rasyidun*. Sementara pasca itu, *khilafah* masuk pada tataran implementasi. *Khilafah* nantinya akan memimpin bangsa-bangsa dan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Negara-negara Islam sekarang akan menjadi propinsi-federal dari sebuah kekhilafahan universal yang harus senantiasa diperjuangkan segenap kaum Muslim. Konsepsi *khilafah* HTI jelas sangat berpengaruh, kalau tidak disebut mengancam, terhadap konsep NKRI. Internasionalisasi yang lintas batas teritorial jelas akan menghilangkan batas-batas teritorial suatu negara bangsa seperti Indonesia. Konsepsi *khilafah* juga mengharuskan perubahan fundamental dasardasar negara bangsa seperti Indonesia.

Over all, penyusun berkeyakinan bahwa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan, dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, serta manusia harus diutamakan di atas bentuk politik pemerintahan dari suatu bangsa. Kalau memang sistem *khilafah* bisa mewujudkan semua itu, tidak ada salahnya diterapkan di atas bumi pertiwi ini.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma z̄hib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fathāh{	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathâh{+ alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a> <i>Istihṣān</i>
2.	Fathâh{+ ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	a> <i>Unsh></i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dâmmah + wâwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathâh{+ ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathâh{+ wawu mati فُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'aan</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menjadikan sistem kekhilafahan sebagai sistem politik Islam yang dengannya umat Islam bisa mencapai kejayaannya pada masa lampau, mudah-mudahan dengannya pula umat Islam bisa mencapai kejayaannya untuk yang kedua kalinya. Salawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan *sayyid al-mursalin*, nabi Muhammad s.a.w., pendiri Daulah *Islamiyah*.

Dengan pertolongan Allah SWT, penyusun bersyukur telah dapat merampungkan penulisan tesis ini. Untuk itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. HM. Amin Abdullah. Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penyusun berhutang banyak terutama kepada Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus sebagai pembimbing tesis ini, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain yang telah memberikan waktu luang di sela-sela kesibukannya yang sangat padat untuk melakukan bimbingan dan penelaahan, serta memberikan saran dan perbaikan guna penyempurnaan tesis ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dr. M. Abd. Karim, M. A., M. A. sebagai penguji II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi yang detail.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada ketua dan sekretaris program studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. dan Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si. yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan nasehat selama penyusun menimba ilmu di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Kepada seluruh guru besar dan dosen Pascasarjana penyusun haturkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, kepada seluruh karyawan, khususnya

mba' Marni yang telah banyak membantu, penyusun ucapkan terima kasih semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Kepada Dr. H. A. Malik Madany, M.A. dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat, penyusun haturkan banyak terima kasih. Kepada Drs. Kholid Zulfa, M. Si. penyusun juga haturkan banyak terima kasih karena atas jasa, dorongan semangat dan barangkali fasilitas, penyusun bisa merampungkan tesis ini.

Kepada kedua orang tua, nenek, mba' dan ponaan yang lucu-lucu, Tita dan Izzul, yang telah mencerahkan cinta, semangat, motivasi dan pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya, penyusun hanya bisa berdoa semoga itu semua dihitung sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Inilah barangkali salah satu bakti penyusun yang sangat tidak berarti kepada keluarga yang sangat penyusun cintai dan sayangi.

Terakhir kepada semua pihak; para peserta program S2 SPPI, dari yang tertua, Sule', Ichal, Bakar, Sidiq, Zaenal, Miski, Satori, dan yang paling cantik di kelas, Elly. Tidak lupa pula, Đë Nûnđ, siapapun dan apapun dikau terima kasih atas semuanya. Kepada para sahabat dan semuanya yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu di sini yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini baik dalam bentuk diskusi, tukar fikiran, dan lain-lainnya, penyusun ucapkan banyak terima kasih. Semoga itu semua dihitung sebagai amal baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Yogyakarta, 28 Agustus 2007

A. Saifuddin, SHI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tela'ah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : <i>KHILAFAH</i> DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA.....	18
A. Definisi <i>khilafah</i>	18
1. Definisi dalam al-Qur'an.....	18
2. Definisi <i>khilafah</i> menurut pandangan ulama/para pakar...20	20
B. Sejarah Perkembangan <i>khilafah</i>	25
1. Masa <i>khulafa' al-rasyidin</i>	27

2. Masa dinasti Umayyah.....	39
3. Masa dinasti Abbasiyah.....	45
4. Masa Dinasti Utsmani.....	48
BAB III : HIZBUT TAHRIR INDONESIA.....	55
A. Sejarah berdirinya HTI.....	55
B. Karakteristik ideologis dan politis HTI.....	58
C. Sikap HTI terhadap modernitas.....	62
D. Pandangan HTI tentang Nasionalisme.....	66
E. Pandangan HTI tentang <i>Nation-state</i>	71
F. Pandangan HTI tentang Demokrasi.....	75
G. Pandangan HTI tentang <i>Khilafah</i>	80
BAB IV : ANALISA DAN KRITIK PEMIKIRAN POLITIK HTI TENTANG <i>KHILAFAH</i>	91
A. <i>Khilafah</i> vs. <i>Nation state</i>	91
B. Antara Islamisme, Arabisme, Wahabisme, dan Pan-Islamisme.....	113
C. Implikasi konsep politik HTI Terhadap Konsep NKRI.....	121
BAB V : PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem atau bentuk negara/pemerintahan ideal tidaklah tunggal dan kekal sepanjang masa. Setiap orang (pemikir) dan setiap zaman memiliki sistem atau bentuk negara/pemerintahan masing-masing yang dianggap ideal. Pada masa Yunani kuno, menurut Plato, bentuk negara ideal adalah monarkhi, sedang yang paling jelek adalah demokrasi. Yang berhak menjadi penguasa menurutnya adalah seorang raja-filosof (*The Philosopher King*).¹

Aristoteles juga berpandangan bahwa negara ideal itu adalah Monarkhi, hanya Aristoteles lebih realistik menyadari bahwa negara Monarkhi nyaris tidak mungkin bisa terwujud, menurutnya bentuk aristokrasi adalah yang paling mungkin terwujud. Dari luas kecilnya negara, Aristoteles berpendapat bentuk negara *polis* atau *city* adalah yang paling ideal.²

Di sepanjang sejarah Islam, bentuk negara ***khilafah*** dengan segala variannya³ menjadi pilihan bentuk paling ideal, paling tidak bagi kepentingan umat Islam. Dari segi luasnya wilayah yang dikuasai, Islam dengan sistem ***khilafah*** telah berhasil menjadi sebuah imperium terluas sepanjang sejarah

¹ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, (Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-19, 2002), hlm. 44.

² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 45-46.

³ Dalam sejarah perkembangannya, lembaga tersebut telah berubah-rubah bentuk dari sistem yang bisa disebut demokratis, yakni pada masa ***khulafa-al-rasyidin***, hingga menjadi sistem kerajaan (monarki) yang absolut dan otoriter.

kekuasaan manusia, membentang luas mulai dari Spanyol, Eropa, Semenanjung Arab, sebagian Afrika dan bahkan India dan Cina.

Namun kemudian di era modern, apalagi setelah dihapuskannya sistem *khilafah* oleh Mustafa Kemal pada tahun 1924⁴ kemudian diganti dengan negara nasional Turki seperti sekarang ini, sistem politik pemerintahan yang dianggap ideal adalah sistem demokrasi khususnya demokrasi liberal.⁵

Modernisasi yang bercirikan mendominasinya paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari lembaga-lembaga sosial-politik, dan hanya memandang agama hanya sebagai masalah individual, diyakini mengakibatkan peranan agama dalam masyarakat menjadi sangat terbatas. Ramalan ini nampaknya benar-benar terjadi dan menimpa agama-agama di Barat, khususnya agama Kristen dan Katolik, tetapi tidak demikian dengan Islam. Islam cukup memiliki daya tahan yang cukup dalam berdialektika dengan modernitas meskipun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi.

⁴ Kalau para sejarawan dan bangsa Turki menyebut Mustafa Kemal sebagai *at-Tatruk* (Bapak bangsa Turki), maka orang-orang HTI biasa menyebutnya *at-Turuk* (orang yang meninggalkan sistem *khilafah* yang *Islamis*) oleh sebab itu, dia dianggap pengkhianat. Sebetulnya kalau mau objektif Mustafa Kemal tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan dalam penghapusan sistem *khilafah* ini. Kebijakan tersebut terpaksa diambilnya karena lembaga tersebut sudah mandul dan posisi Turki sendiri sebagai negara yang pernah menjadi *super power* sudah tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan apalagi pasca pengkhianatan Arab Saudi (Wahabi) pada perang dunia pertama yang menyebabkan Palestina terlepas dari pangkuan Islam.

⁵ Francis Fukuyama mengatakan bahwa perkembangan ideologi-ideologi umat manusia akan berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Menurutnya kapitalisme sebagai sebuah ideologi tampak semakin menguat dengan adanya blok-blok perdagangan maupun penyatuhan negara-negara di kawasan tertentu untuk kepentingan ekonomi, sementara demokrasi liberal menurutnya akan menjadi prototipe dari model pemerintahan di masa mendatang. Intinya menurut Fukuyama kapitalisme ekonomi dan demokrasi liberal merupakan masa depan yang ideal: Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. MH. Amrullah (Yogyakarta: Qalam, 2004), hlm. 1.

Islam, terutama pada abad XX, sedang menghadapi tantangan yang cukup besar dalam bidang politik dan sosial. Sebagian besar negara-negara Muslim sedang dalam perjuangan membebaskan diri dari kolonialisme Barat, pertikaian Arab-Israel, dan persoalan-persoalan modernisasi. Modernisasi dalam bidang politik adalah muncul dan dominannya konsep *nation-state*. Konsep *nation-state* ditegakkan atas dasar semangat nasionalisme.

Sistem *nation state* adalah sebuah sistem politik kenegaraan yang lebih berdasarkan pada kesamaan bangsa bukan berdasarkan kesamaan agama. Sistem *nation state* juga ditandai dengan adanya batas geografis dan teritorial. Inilah yang membedakan dengan sistem ***khilafah*** yang tidak mengenal batas-batas geografis dan teritorial. Dengan kata lain, sebenarnya sistem *nation state* berdiri secara diametral dengan sistem ***khilafah***.

Dalam merespon konsep *nation-state* ini, umat Islam terpecah ke dalam dua model pemikiran. Pertama, respon konformis, yaitu menerima konsep *nation-state*, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. Kedua respon non-konformis, yaitu menolak sebagian atau keseluruhan konsep *nation-state*⁶. Biasanya kelompok ini mengajukan konsep Islam untuk menggantikan tawaran konsep *nation-state*, seperti dilakukan HTI, yaitu dengan mengajukan konsep ***khilafah***.

⁶ James P. Piscatori, *Islam in a World of Nation State* (New York: Cambridge, 1994), hlm. 40.

Mendirikan kembali sistem *khilafah* untuk menggantikan sistem Barat yang sudah *established*, menurut penyusun, tidak mudah, apalagi kalau kita 'membaca' sejarah dengan kritis, yaitu membaca sejarah dengan tidak hanya melihat aspek kehebatan, keunggulan, dan harmoni dalam Islam. Pembacaan terhadap sejarah Islam khususnya sejarah politiknya harus diperlakukan sama sebagaimana membaca sejarah yang lain, sejarah orang lain. Pembacaan sejarah politik Islam yang kritis harus juga melihat kelemahan dan konflik yang terjadi di antara para pemimpinnya, baik itu konflik yang berasal dari rivalitas politik, konflik suku, teologi, dan lain sebagainya. Sejarah politik Islam tidaklah semulus yang kita kira, di dalamnya ada nafsu (*interest*) kekuasaan, kudeta, kekerasan (*violence*) politik, penghianatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme serta sekian perilaku menyimpang yang 'biasa' ada dalam setiap percaturan politik di manapun.

Oleh karena itu, mengajukan konsep *khilafah* di era modern yang didominasi oleh sistem *nation-state* dan paham demokrasi liberal tentu menjadi sesuatu yang aneh karena seakan-akan menentang arus yang *mainstream* dan dianggap utopis, tetapi hal demikian bukan berarti mustahil, apalagi sistem *khilafah* sudah pernah ada dan teraplikasi dalam sejarah. Bukankah siklus waktu selalu berputar bisa jadi sesuatu yang pernah ada dan terukir dalam sejarah akan kembali lagi menghiasi panggung sejarah politik saat ini.

Di samping itu, kebangkitan Islam di akhir 70-an (terutama setelah revolusi Islam Iran tahun 1979) semakin memperkuat gerakan 'Islamisasi'

sistem politik. Dengan demikian, realitas ini telah meruntuhkan ramalan ilmiah yang dikemukakan oleh pakar-pakar Barat, sehingga seorang John L. Esposito sampai menyatakan bahwa gejala tersebut telah memperkuat dugaan bahwa Islam telah tampil kembali (*coming back*) dan menjadi faktor penting dalam perubahan politik dan sosial dalam bentuk yang sukar untuk dijelaskan.⁷

Pertanyaan-pertanyaan dan pengandaian tersebut di atas yang barangkali menjadi semacam landasan baik normatif, sosiologis, maupun politis bagi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia untuk menggaungkan konsep ***khilafah*** untuk menjadi sistem alternatif dari sistem politik yang ada saat ini yang dianggap sudah tidak lagi bisa mengayomi kepentingan Islam dan umat Islam. Tetapi persoalannya apakah memang benar-benar mungkin mendirikan kembali sistem ***khilafah*** ini, sistem ***khilafah*** yang mana, dan andaikata sistem ini bisa ditegakkan di negara Indonesia misalnya, bagaimana implikasi konsep ini terhadap konsep NKRI yang seakan-akan sudah menjadi *final system* bagi negara Indonesia dan merupakan harga mati yang harus ditegakkan, bahkan dengan cucuran darah dan nyawa sekalipun terutama bagi kalangan tentara (TNI).

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas menurut penyusun meneliti konsep Islam khususnya di sini meneliti pemikiran politik HTI tentang ***khilafah*** menjadi sesuatu yang urgen dan bukan sesuatu yang *out*

⁷ John L. Esposito, dalam “Pendahuluan” buku Identitas *Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*, terj. A. Rahman Zainuddin. (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 4.

of date serta tidak perlu, justru sebaliknya, merupakan sesuatu yang aktual, *up to date* dan menarik, apalagi di ambang kehancuran sistem demokrasi liberal sebagai sistem politik paling dominan saat ini.⁸

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini perlu disusun rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana konsepsi politik HTI tentang *khilafah*.
2. mengapa HTI selalu mengajukan konsep *khilafah* dalam memecahkan segala persoalan umat Islam dewasa ini.
3. bagaimana implikasinya terhadap konsep NKRI.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk membedah konsep politik HTI mengenai *khilafah*. Di samping itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dan menemukan alasan strategis baik sosiologis, politis, maupun

⁸ Sistem demokrasi liberal sendiri, yaitu sistem yang menempatkan negara sebagai satu-satunya arena bagi terakumulasinya kekuasaan dan mengasumsikan peran neutralnya sebagai wasit bagi berlangsungnya berbagai kepentingan warga negara di negara yang melahirkan dan membekarkannya telah banyak dikritik dan digugat. Warga negara menjadi apatis. Di tengah kondisi semacam ini muncul apa yang dikenal dengan *risk society*. Pada wilayah politik, *risk society* melahirkan fenomena-fenomena politik yang disebut secara bervariatif sebagai *sub politic*, *everyday politic*, *daily politic*, and *life politic* atau juga disebut sebagai *secondary reality of political practices*. Dengan kemunculan fenomena-fenomena politik seperti itu membuat posisi demokrasi liberal tidak lagi sebagai satu-satunya arena politik yang dominan. Selengkapnya baca Amalinda Savirani, "Ilmu Pemerintahan Masa Depan: Mengadopsi Politik Pinggiran" dalam jurnal *Transformasi* Volume 1, Nomor 1, September 2003, hlm. 65-66.

ideologis, mengapa HTI selalu menawarkan konsep *khilafah* dalam memecahkan setiap persoalan umat Islam dewasa ini. Setelah diketahui gambaran konsep dan alasan-alasan yang ada di balik konsep tersebut adakah implikasinya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Kegunaan

Secara teoretis-akademis, penelitian ini berguna untuk menjelaskan konsep politik (dalam hal ini konsep politik HTI tentang *khilafah*), yang dalam percaturan wacana akademik (*academic discourse*) yang Barat sentris, dianggap tidak memiliki kebenaran realitas,⁹ romantisme masa lalu, dan merupakan konsep politik yang sudah *out of date*. Secara praksis, pertama penelitian ini dapat menguji konsep politik HTI tentang *khilafah*, apakah saat ini konsep tersebut masih dapat diberlakukan, kalaupun bisa apakah konsepnya sama seperti zaman dahulu ataukah sudah mengalami perubahan atau modifikasi-modifikasi. Kedua dengan penelitian ini dapat diketahui alasan-alasan strategis baik sosiologis, politis maupun ideologis yang dimiliki HTI sehingga selalu menawarkan konsep *khilafah* dalam setiap strategi politiknya.

⁹ Teori Kebenaran Korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan adalah benar apabila sesuai dengan fakta, dan suatu pernyataan adalah tidak benar apabila tidak sesuai dengan fakta. Jadi ekuivalensi antara pernyataan dengan fakta adalah ukuran kebenaran menurut teori korespondensi; W. H. Walsh, *Philosophy of History: An Introduction* (New York: Harper Torchbooks, 1967), hlm. 73-74.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka membahas topik penelitian ini, penyusun telah menelaah beberapa referensi yang bisa dijadikan pijakan awal (*starting point*) dalam melakukan penelitian ini, selanjutnya berangkat dari beberapa referensi tersebut penyusun menentukan *the position of the researcher* dalam tema penelitian yang sama atau mirip.

Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang penyusun angkat di antaranya adalah buku *al-Mausu'at al-Muyassarah fi-al-Adya'a wa al-Mazhib al-Mu'asirah*. Buku yang diterbitkan oleh WAMY yang bermarkas di Saudi Arabia ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*¹⁰. Buku yang memaparkan 58 gerakan keagamaan dan pemikiran ini menjelaskan tentang sejarah berdiri dan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, serta pemikiran dan doktrin-doktrinnya. Di bagian akhir, buku ini mengkritik aspek dakwah, politik, dan pemahaman Hizbut Tahrir tentang fiqh. Disebutkan bahwa Hizbut Tahrir terlalu disibukkan oleh berbagai diskusi dan perdebatan dengan aliran-aliran Islam lain, mengandalkan kekuatan luar dalam mencapai kekuasaan, melalui permintaan bantuan. Cita-citanya adalah merebut kekuasaan, bersikap permusuhan terhadap semua sistem meskipun mereka sendiri bergerak di lingkungan sistem tersebut, dan lain sebagainya.

¹⁰ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyullah. (Jakarta: Al-I'tishom, 2002), hlm. 88-94.

Buku lainnya yang berasal dari penelitian lapangan adalah: *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*¹¹. Di dalam buku ini, Hizbut Tahrir Indonesia memang disebut meskipun dalam porsi yang sangat sedikit. Hal penting yang perlu dicatat dari buku ini adalah bahwa Hizbut Tahrir Indonesia merupakan salah satu gerakan kelompok lama yang mampu lolos dari tindakan keras Orde Baru dikarenakan kelompok ini mampu menyesuaikan diri dengan rezim pada saat itu. Disebutkan pula bahwa Hizbut Tahrir masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1972 dan berasal dari Yordania. Kesimpulan dari penelitian di dalam buku ini adalah terdapat kesamaan atau kemiripan ideologi antara gerakan militan di Indonesia dengan yang ada di Timur Tengah. Hizbut Tahrir mengangkat ide-ide pan-Islamisme Jamaluddin al-Afgani, ideologi yang dikembangkan di Indonesia oleh gerakan-gerakan militan Islam adalah jihad, syari'at Islam, dan amar ma'ruf nahi munkar, terdapat dugaan keterlibatan militer dengan gerakan-gerakan militan Islam, dan terakhir antar kelompok gerakan terdapat jalinan hubungan yang saling mendukung satu dengan yang lain dan sangat dekat.

Penelitian tentang beberapa gerakan Islam di Indonesia dilakukan oleh Khamami Zada sebagai karya penelitian untuk meraih gelar sarjana strata dua. Khamami Zada dalam penelitiannya yang menggunakan perspektif

¹¹ S. Yunanto, et. al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara* (Jakarta: The Ridep Institute, 2003), hlm. 135-146.

historis menyatakan bahwa beberapa gerakan Islam di Indonesia, termasuk HTI, adalah kelompok garis keras.¹²

Haedar Nashir dalam penelitian disertasi guna meraih gelar doktornya menyatakan bahwa gerakan Islam syari'at, termasuk HTI, telah melakukan upaya politisasi syari'at melalui jalur konstitusi dengan perjuangan politik. Karena perjuangannya adalah Islamisasi ajaran agama secara ketat berdasarkan idealisasi Islam di zaman Nabi dan generasi salaf yang salih, maka gerakan-gerakan tersebut disebut sebagai gerakan salafiyah. Gerakan-gerakan tersebut sebenarnya merupakan reproduksi gerakan salafiyah ideologis di Indonesia.¹³

Karya-karya lainnya baik dalam bentuk buku, makalah, skripsi/tesis/disertasi, kliping koran, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas dipertimbangkan sebagai referensi untuk memperkaya data penelitian ini.

Dari penelusuran pustaka tersebut dapat dilihat bahwa penelitian yang penyusun angkat berbeda dengan penelitian lainnya dalam hal bahwa belum ada satupun penelitian yang berbicara konsep politik HTI dengan melihat sikap dan pandangan HTI ketika berdialektika dengan modernitas dan sekian paham yang dibawanya. Di samping itu, penelitian terdahulu yang berbicara

¹² Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002)

¹³ Haedar Nashir, Review Disertasi “Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 42-43.

mengenai konsep HTI hanya menggunakan kerangka teori atau pendekatan *fiqh siyasah* dan sangat normatif tanpa mendekatinya secara sosiologis. Hal lainnya adalah belum ada penelitian yang melihat implikasi konsep politik HTI terhadap konsep NKRI. Dengan demikian, penelitian ini adalah *genuine* dilihat dari beberapa pertimbangan di atas.

E. Kerangka Teoretik

Dalam meneliti konsep politik HTI tentang *khilafah*, penyusun menggunakan beberapa kerangka berpikir. Pertama dalam melihat konsep normatif HTI, penyusun menggunakan pemetaan model pemikiran dalam Islam mengenai ketatanegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Islam terdapat tiga aliran pemikiran mengenai ketatanegaraan, khususnya dalam hal respon mereka terhadap sistem *khilafah*. Kelompok pertama adalah kelompok yang anti terhadap semua yang datang dari Barat. Mereka menghendaki agar kembali kepada kemurnian Islam yaitu dengan mewajibkan pemberlakuan sistem *khilafah*.

Kelompok kedua di samping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian bahwa selain pemurnian, harus pula dipikirkan kemungkinan adaptasi dengan zaman modern.

Kelompok ketiga adalah kelompok sekular sebagaimana dalam pengertian Barat yang menganggap, bahwa agama harus dipisahkan dari

politik. Oleh sebab itu, kelompok ini sangat menolak konsep *khilafah*¹⁴.

Kalau dilihat dari tiga kecenderungan tersebut, tampaknya HTI berada dalam kelompok yang pertama karena mereka selalu mengajukan konsep *khilafah* sebagai pengganti sistem politik yang berlaku saat ini.

Kemudian untuk melihat HTI secara sosiologis, penyusun meminjam kerangka teori yang diajukan oleh John O. Voll. Menurutnya, vitalitas dinamika keyakinan keagamaan (Islam) memiliki bentuk yang beraneka ragam karena kondisi sejarah yang berubah. Oleh sebab itu, setiap pengujian terhadap Islam dalam dunia modern menurutnya harus melihat pengalaman-pengalaman masa lalu dalam rangka memahami secara tepat keadaan sekarang.¹⁵

Dalam melihat sejarah masa lalu, penyusun menggunakan pendekatan sejarah analitis (kritis). Pendekatan sejarah semacam ini ditunjukkan di dalam penulisan masa lampau tidak semata-mata bermaksud menceritakan kejadian, tetapi juga menerangkan kejadian-kejadian itu dengan mengkaji kausalitasnya. Dalam hal ini peristiwa masa lalu dianalisis secara mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.¹⁶ Jadi secara kritis, pendekatan sejarah itu bukanlah sebatas melihat

¹⁴ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi 5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 115-116.

¹⁵ John O. Voll, *Islam Continuity and Change in the Modern World* (USA: Westview Press, 1982), hlm. 19.

¹⁶ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 14.

segi pertumbuhan, perkembangan serta keruntuhan mengenai sesuatu peristiwa, melainkan juga mampu memahami gejala-gejala struktural yang menyertai peristiwa.¹⁷

Kembali kepada Voll, menurutnya untuk memperoleh hasil pengujian yang tepat dan berimbang, ia menawarkan pendekatan tiga dimensi.¹⁸ Pertama, kepentingan-kepentingan individual dan kelompok harus diidentifikasi, lokalitas harus diperhatikan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu penelusuran data terhadap orang-orang kunci (*key person*) dalam organisasi semacam HTI.

Kedua, hubungan gerakan-gerakan Islam yang beraneka ragam (dalam konteks penelitian ini adalah HTI) dengan dinamika sejarah modern. Bagaimana hubungan antara Islam dan Barat, khususnya bagaimana respon Islam (HTI) terhadap modernitas dan semua paham yang dibawanya, termasuk di dalamnya bagaimana posisi konsep *khilafah* ketika berhadapan dengan konsep *nation-state* yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai gelombang terakhir.

Ketiga, keadaan Islam sendiri. Kebangkitan Islam di akhir abad XX bukanlah sesuatu yang unik karena hal itu bisa dilihat sebagai suatu tradisi yang berkelanjutan (*continuity*). Menurut Voll, kebangkitan Islam, revivalisme Islam, fundamentalisme Islam, dan istilah-istilah sejenisnya harus

¹⁷ Dudung Abdurrahman, “Pendekatan Sejarah Dalam Penelitian Agama”, jurnal *Maddana Jurnal Ilmu Sejarah dan Kebudayaan* edisi 6, Tahun VI 2004 (Yogyakarta: Departemen Pers dan Jurnalistik BEMJ Sejarah dan Peradaban Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 96.

¹⁸ Voll, *Islam*, hlm. 19-20

dipandang dalam konteks Islam, bukan dengan perspektif selain Islam, misalnya perspektif Barat.

F. Metode Penelitian

Telah disebut di muka bahwa jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka digunakan untuk melihat, mempelajari, dan menganalisis sejumlah referensi atau data baik primer maupun sekunder tentang konsep HTI secara umum tentang politik maupun secara khusus tentang konsep *khilafah*.

Data primer dari tema yang diangkat dalam penelitian ini antara lain adalah karya-karya yang ditulis oleh tokoh pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani, seperti: *Mafahim Hizbut Tahrir*, *al-Daulat al-Islamiyyah*, *Pembentukan Partai Politik Islam*, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, *Sistem Pemerintahan Islam*, dan *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Di samping itu, terdapat karya Abdul Qadim Zallum seperti: *Hakazh Huddimat al- Khilafah*, *Pemikiran Politik Islam*, dan *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*.

Sementara untuk memperkaya data, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data misalnya wawancara, dokumentasi, dan observasi. Khusus mengenai wawancara dilakukan terhadap orang-orang kunci (*key person*) yang ada dalam HTI seperti Muhammad Ismail Yusanto (Sekjend HTI pusat) dan Muhammad Shiddiq al-Jawi (dosen ekonomi Islam STAIN Surakarta),

maupun tokoh-tokoh lainnya yang dianggap memiliki pengaruh kuat dalam HTI. Dengan wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci diketahui riwayat hidup (*life history*) masing-masing tokoh yang meliputi ideologi yang dipegangi, riwayat pendidikan, keluarga, cita-cita, pandangan-pandangannya, dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah deskriptif-analitis-kritis, yaitu menggambarkan sejumlah sikap dan perilaku, serta pandangan HTI dalam politik kemudian dianalisis sesuai kecenderungannya dan diakhiri dengan penilaian kritis terhadap sikap dan pandangan HTI.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemikiran politik HTI, penulis menggunakan pendekatan normatif-historis-sosiologis. Dengan pendekatan normatif bisa diketahui doktrin, *way of life*, dan sejumlah ide yang dimiliki oleh HTI. Historis digunakan untuk melihat kronologis, fakta, dan peta sejarah baik yang berkaitan dengan sejarah institusi *khilafah* maupun HTI sendiri. Sementara sosiologis digunakan untuk melihat, menguji, dan memperbandingkan antara ideal moral HTI dan perilaku sosial-politiknya.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini memberikan perspektif terhadap pemikiran politik HTI tentang *khilafah* dan alasan-alasan yang ada di balik pemikiran

politiknya. Untuk mempermudah dalam penyajian, penelitian ini dibagi dalam lima bab.

Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (*prior research*), kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Selanjutnya bab pertama menjadi pendahuluan tesis ini. Pendahuluan ini menjadi *entry point* untuk pembahasan lebih lanjut mengenai konsepsi ***khilafah*** menurut Hizbut Tahrir Indonesia.

Bab kedua memberikan gambaran mengenai definisi ***khilafah*** dan sejarah perkembangannya. Definisi yang dielaborasi adalah definisi berdasarkan al-Qur'an dan berdasarkan pendapat para pakar dalam sejarah politik Islam. Sementara sejarah tentang ***khilafah*** akan dimulai pada masa ***khulafa' al-rasyidin***, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, hingga Daulah Utsmaniyyah. Penuturan sejarah ini penting untuk melihat kontinuitas suatu gagasan pemikiran dan prakteknya dalam kehidupan.

Bab ketiga mengelaborasi HTI baik sejarah berdirinya maupun karakter ideologis dan politisnya. Bab ini juga memaparkan pandangan politik HTI tentang beberapa isu seperti modernitas, nasionalisme, demokrasi, *nation-state*, dan pandangannya tentang ***khilafah*** itu sendiri. Data dan informasi ini penting untuk melihat dan menganalisis pemikiran politik HTI terutama tentang konsep ***khilafahnya*** secara komprehensif, jujur, dan berimbang.

Bab keempat menganalisis secara kritis data-data yang telah disajikan pada bab kedua dan ketiga khususnya mengenai pandangan politik HTI tentang *khilafah*. Di samping itu, bab ini juga mencari akar gagasan HTI kenapa selalu mendengung-dengungkan *khilafah* di era modern ini. Di akhir bab ini, penyusun memaparkan implikasi konsep politik HTI terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bab kelima merupakan kesimpulan dari pokok masalah yang telah dielaborasi dan dianalisis secara kritis pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini penyusun dapat memberikan kontribusi ilmiah (*contribution to knowledge*) mengenai pokok masalah yang diangkat, baik untuk kepentingan akademis-teoretis maupun kepentingan praksis, yang terkumpul dalam saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh apa yang dipaparkan pada bab-bab terdahulu, nampak dengan jelas bahwa menurut HTI, sistem pemerintahan Islam adalah *khilafah* yang mengikuti pedoman Nabi (*khilafah 'ala>minha& al-Nubuwwah*). Dalam bayangan HTI. Sistem *khilafah* berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, *maqayis*, dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya; ataupun dari segi bentuknya. Sistem *khilafah* dianggap berbeda karena sistem pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan, bukan sistem imperium (kekaisaran), bukan sistem federasi, dan bukan pula sistem republik.

Secara konsepsi, *khilafah* menurut HTI adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. Konsep tersebut termanifestasi secara ideal pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Sementara pasca itu *khilafah* masuk pada tataran implementasi. HTI membedakan antara tataran konsepsi dengan tataran implementasi. Pada tataran implementasi HTI mengakui bahwa dalam sejarahnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari konsepsinya yang ideal, misalnya kasus pemaksaan Mu'awiyah terhadap umat Islam untuk membai'at anaknya, Yazid.

Dalam pandangan HTI, *khilafah* nantinya akan memimpin bangsa-bangsa dan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Negara-negara Islam

sekarang akan menjadi propinsi-federal dari sebuah **kekhilafahan** universal yang harus senantiasa diperjuangkan segenap kaum Muslim. Karena dasar pokok **khilafah** bersifat transenden—mengatasi batas-batas rasial, geografis, dan kultur—maka **khilafah** berlaku secara universal dan inklusif bagi seluruh umat manusia.

Menurut HTI, kaum Muslim di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara dan wajib pula hanya ada satu **khilafah** bagi mereka. Secara syar'i, kaum Muslim di seluruh dunia haram memiliki lebih dari satu negara dan lebih dari seorang **khilafah**.

Sistem politik yang diajukan oleh HTI adalah sistem yang bersendikan syari'ah, **khilafah** hanyalah *wasilah* untuk *tatbiq al-syari'ah*. Pandangan politik HTI yang menyatakan bahwa negara atau politik harus bersendikan syari'ah dan bentuk konsep dan historisnya, menurut mereka, ada pada sistem **khilafah**. Sepanjang sejarah politik umat Islam hanya sistem **khilafah** yang mengandung keseluruhan dari Islam, bukan sistem yang lain.

Konsep **khilafah** diajukan oleh HTI di samping karena alasan-alasan internal ideologis juga karena konsep politik yang dianggap *established* saat ini—*nation-state*—sedang berada di ambang kehancurannya dengan munculnya globalisasi. Globalisasi bisa menjadi *the end of nation-state*.

Konsepsi **khilafah** HTI jelas sangat berpengaruh, kalau tidak disebut mengancam, terhadap konsep NKRI. Internasionalisasi yang lintas batas teritorial jelas akan menghilangkan batas-batas teritorial suatu negara bangsa seperti Indonesia. Konsepsi **khilafah** juga mengharuskan perubahan fundamental dasar-

dasar negara bangsa seperti Indonesia. Dengan kata lain, kalau sistem *khilafah* diterapkan di Indonesia, Indonesia saat ini akan hilang dari peredaran, meskipun sebetulnya Indonesia saat ini juga dipertanyakan keberadaannya. Betulkah Indonesia itu ada ataukah Indonesia hanya merupakan imajinasi Soekarno dan warga bangsa setelahnya.

B. Saran

Secara teoretis, penelitian tentang gerakan Islam yang tidak hanya melihat dengan menggunakan kaca mata Barat, tetapi juga dengan mencoba masuk ke dalam alam pikiran gerakan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, perlu untuk semakin diperbanyak. Hal ini penting dilakukan supaya ada keseimbangan (*balance*) perspektif. Selama ini suatu karya ilmiah dinilai berbobot akademis (ilmiah), apabila rujukan-rujukannya selalu menggunakan referensi Barat. Seakan dianggap kurang ilmiah dan kuno kalau menggunakan rujukan atau referensi dan perspektif yang datang dari dalam (*from within*) Islam.

Kecenderungan untuk selalu berkiblat kepada Barat, anehnya, justru banyak dianut kalangan intelektual IAIN/STAIN/UIN yang *notabene* dinggap lembaga pendidikan Islam. Mata kuliah sejarah, misalnya seperti kurang *afdbI* kalau hanya memakai rujukan *khulasah nur al-yaqin, tarikh al-khulafa', tarikh al-umam wa al-mulk*, dan lain-lain, bukan dengan rujukan karya-karya Philip K. Hitti, Thomas Arnold, W. M. Watt, dan lain-lain. Justru memojokkan Nabi saat Ibn Ubaiy dianggapnya lebih kuat dari pada Nabi di Madinah.

Dengan kondisi demikian, tidak heran kalau di lembaga pendidikan Islam seperti IAIN/STAIN/UIN muncul krisis penguasaan kitab-kitab klasik

berbahasa Arab yang tidak hanya dialami para mahasiswanya tetapi juga para dosenya. Civitas akademika di lembaga tersebut lebih bangga kalau bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi seperti tidak merasa malu kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Ke depan seharusnya ada reorientasi ketenagaan agar civitas akademika yang ada di lembaga pendidikan Islam tidak teralienasi dari dirinya sendiri.

Di samping hal di atas, terdapat suatu bagian yang tidak disentuh oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu hermeneutika pemikiran dan penafsiran HTI. Oleh karena keterbatasan ruang dan waktu penyusun, maka hal ini penyusun sarankan/rekomendasikan kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk diulas lebih lanjut, karena dengan menggunakan hermeneutika, penyusun meyakini akan diperoleh suatu hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Secara praksis, penelitian ini bisa menjadi alternatif dalam mengurus suatu pemerintahan atau negara ketika terjadi krisis sistem politik di suatu negara atau ketika masyarakat bangsa tersebut bersepakat untuk menjadikan sistem *khilafah* sebagai sistem dalam berbangsa dan bernegara. Dalam era demokrasi mestinya hal seperti ini tidak bisa dilarang oleh siapapun, tetapi dengan catatan tidak menimbulkan kekerasan (*violence*).

Sebagai negara bangsa, Indonesia sepertinya sudah dilanda serangan globalisasi yang mengaburkan batas-batas teritorial, simbol, dan kedaulatannya. Negara ini juga sudah sangat lemah tidak hanya menghadapi negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, tetapi juga tidak berdaya menghadapi

negara kecil seperti Singapura yang luas wilayahnya barangkali hanya seluas Jakarta.

Dengan pandangan di atas tidak berarti penyusun menginginkan kehancuran bangsa Indonesia, tempat di mana penyusun telah dilahirkan dan dibesarkan, tetapi menurut penyusun yang paling penting, rakyat Indonesia merasakan kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan terlepas apakah negaranya bernama NKRI, Republik, Kerajaan, atau *khilafah*. Kalau memang kebahagiaan, kemakmuran, keadilan, dan kebanggaan sebagai bangsa dan sebagai manusia bisa diperoleh melalui perubahan sistem politik pemerintahan dari NKRI ke *khilafah* kenapa tidak

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rustow, Dankwart. entri “Nation” dalam David L. Sills (ed). *International Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. 11, New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (1966-1993), Yogyakarta: Tiara wacana, 1999.
- Abdullah, Taufik ... (et al.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Abdurrahman, Dudung, “Pendekatan Sejarah Dalam Penelitian Agama”, jurnal *Maddana* Jurnal Ilmu Sejarah dan Kebudayaan, edisi 6, Tahun VI 2004, Yogyakarta: Departemen Pers dan Jurnalistik BEMJ Sejarah dan Peradaba Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin, dan Herdi Sahrasad, *Federasi atau Desintegrasi*, Jakarta: Madani Press, 2000.
- Al-Banna, Hasan, *Musykilatu fi>Daw al-Nid̄m al-Islām*, Cairo: t. t. dalam Zafar Ishaq Ansari. "Contemporary Islam and Nationalism, A Case Study of Egypt," Die Welt Des Islams, N.S. Vol.7. NR. 1-4, 1961.
- Al-Fayyadl, Muhammad, *Derrida*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Al-Maqdisi, Faid al-Allāh al-Hasani, >*Fath al-Rahman li Tālib Ayat al-Qur'aan*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah*, Beirut: Maktabah al-Islamy, 1996.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin, *Daulah Islam* (edisi Mu'tamadah), terj. Umar Faruq, dkk, Jakarta: HTI Press, 2006.
- , *Mafāhīm Hizbut Tahrir* (edisi Mu'atamadah), terj. Abdullah, Jakarta: HTI Press, cet ke 2, 2006.

- , *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. oleh Zakaria, Labib, dkk, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. 2, 2002.
- , *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, dkk., (edisi Mu'tamadah), Jakarta: HTI Press, 2006.
- , *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan & Administrasi)*, terj. Yahya A.R., Jakarta, HTI Press, 2006
- Al-Suyutî, Jalał al-Dîn Abd al-Rahman, *Tarikh al-Khulâfa'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Insist, 2001.
- Anwar, M. Zaenal & A. Saifuddin (ed), *Pergumulan Tak Kunjung Usai: Islam dan Negara Bangsa di Indonesia*, Yogyakarta: Politeia Press, 2007.
- Aqqad, Abbas Mahmud, *Keagungan Ali bin Abu Thalib*, terj. Abdulkadir Mahdamy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, cet.3, 1994.
- Arnold, Sir Thomas W., *The Caliphate*, Oxford: Clarendon Press, 1924.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, MA., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 2, 2004.
- At-Tâbârî, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996.

- Bilici, Mucahit, "Umma and Empire: Global Formations after Nation" dalam Ibrahim M. Abu-Rabi' (editor), *Contemporary Islamic Thought*, USA: Blackwell Publishing Ltd., 2006.
- Coulson, N. J., "The State and the Individual," ed. J. Steward-Robinson, *The Traditional Near East*, (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1966.
- Crone, Patricia dan Martin Hinds dalam bukunya *God's Caliph Religious Authority in the First Centuries of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Departemen Agama R. I. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Alwaah, 1993.
- Effendi, Bahtiar, "Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor) *Islam, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: PARAMADINA, 2005.
- Ellyawati, "Khilafah Islamiyah Dalam Pandangan Hizbut Tahrir", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2003.
- Emerson, Rupert, *From Empire to Nation, The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples*, Boston: Beacon Press, 1960.
- Esposito, John L., dalam "Pendahuluan" buku Identitas *Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Faishol, Ahmad, "Bentuk Pemerintahan Menurut Hizbut Tahrir Perspektif Fiqh Siyasah dan Implementasinya di Indonesia", Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, 2005.

Fuad, Abu dan Abu Raihan (ed), *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, terj. Nurkhalis, Bogor: PT. Thariqul Izzah, 2002.

Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, terj. MH. Amrullah, Yogyakarta: Qalam, 2004.

Garaudy, Roger, *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1993.

Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius, cet. 19, 2002.

Haikal, Muhammad, *Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq*, terj. Abdulkadir Mahdamy, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Al-Nudūj al-Islamiyyah li al-Sunnah al-Taujihah*, Kairo: Matba'ah li Jannat al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953.

Hasan, Ibrahim, *Tarikh Islam*, Juz I, Mesir: Maktabah Nahdah, 1976.

Hasan, Noorhaidi, "Transnational Islam within the Boundary of National Politics: Middle Eastern *Fatwas* on Jihad in the Moluccas", sebuah makalah yang dipresentasikan pada Konferensi *Fatwas and Dissemination of Religious Authority in Indonesia* yang dilaksanakan oleh International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden, 31 Oktober 2002

Held, David, *Demokrasi & Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, terj Damanhuri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF "Tipologi Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor) *Islam, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: PARAMADINA, 2005.

Hitti, Philip K., *History of the Arab; From the Earliest Times to the Present*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

<http://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2007.

<http://www.google.com>, “Tarikh/Sejarah Khilafah”, diakses pada tanggal 12 Mei 2007

Hudson, Michael C., “Islam dan Perkembangan Politik” dalam John L. Esposito editor, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi-Naqd Kalam al-Siyah wa al-Qadariyah*, jilid 1, Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962.

Ka'bah, Rifyal, “Modernisme dan Fundamentalisme Ditinjau dari Konteks Islam”, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor I, Volume V Tahun 1994.

Kamali, Mohammad Hashim, “The Islamic State and Its Constitution”, dalam Norani Othman (editor), *Shari'a Law and the Modern Nations-State a Malaysian Symposium*, Kuala Lumpur, Sisters in Islam, 1994.

Kaptein, Nico J.G. (editor), *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur Pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluh*, terj. Lillian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 2003.

Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

Khan, Qomaruddin, *The Political Thought of Ibn Taimiyah*, 2nd edition, Pakistan: Islamic Research Institute, 1985.

Larif-Béatrix, Asma, "The Muslim State: Pursuing a Mirage?", dalam Norani Othman (editor), *Shari'a Law and the Modern Nation State: A Malaysian Symposium*, Selangor Malaysia: Sisters in Islam, 1994.

Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*, terj. A. Najiyyullah, penyunting Abu Ridha, Jakarta: Al-I'tishom, 2002.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.

Nashir, Haedar, Review Disertasi "Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2006.

Ohmae, Kenichi, *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Berbatas*, terj. Ruslani. Yogyakarta: Qalam, cet. 1., 2002.

Panggabean, Syamsurizal dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.

Paydar, Manouchehr, *Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa*, terj. M. Maufur, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.

Piscatori, James P., *Islam in a World of Nation State*, New York: Cambridge, 1994.

R. C. Repp., *The Mufti of Istanbul: A Study in the Development of Ottoman Learned Hierarchy*, London: Ithaca Press, 1986.

Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999.

Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, terj. Carol Volk, Cambridge: Harvard University Press, 1963.

Sasmono, Sudarmono, "Mau Kemana Aktifis Masjid Kampus" dalam <http://www.students.stttelkom.ac.id> Forum. Diakses pada tanggal 15 Mei 2007.

Satori, Akhmad, "Konsep Ibn Khaldun Tentang Pemerintah dan Negara" dalam Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Politeia Press, 2007.

Savirani, Amalinda, "Ilmu Pemerintahan Masa Depan: Mengadopsi Politik Pinggiran" jurnal Transformasi Volume 1, Nomor 1, September 2003

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi 5, Jakarta: UI Press, 1993.

Sou'yib, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Stoddard, Lathrop, *The New World of Islam*, London: Chapman and Hall Ltd., 1922.

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Surata, Agus dan Tuhana Taufiq A., *Runtuhnya Negara Bangsa*, Yogyakarta: UPN Veteran, 2002.

Voll, John O., *Islam Continuity and Change in the Modern World*, USA: Westview Press, 1982.

Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Walsh, W. H., *Philosophy of History: An Introduction*, New York: Harper Torchbooks, 1967.

Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought: The Basic Concept*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968.

Yunanto, S., et. al., *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara*, Jakarta: The Ridep Institute, 2003.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zallum, Abdul Qadim, *Pemikiran Politik Islam: Mengemukakan Ketinggian Politik Islam*, terj. Abu Faiz, Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: A. Saifuddin, SHI.
Tempat/tgl. Lahir	: Pamekasan, 15 Juli 1978
Alamat Rumah	: RT/RW 03/07 Desa Larangan Dalam Kec. Larangan Kab. Pamekasan 69383 Telp./HP : 08174116499
Nama ayah	: Martuyan
Nama Ibu	: Djunawati

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Sabilul Huda Sumber Nangka Pamekasan lulus tahun 1991
 - b. MTs Mambaul Ulum PP. Bata-Bata Pamekasan lulus 1993
 - c. MA. Mambaul Ulum PP. Bata-Bata Pamekasan lulus 1997
 - d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2004
2. Pendidikan non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan (1991-1997)
 - b. Kursus Bahasa Inggris di EF Golden English Bridge Pamekasan (1995-1996)
 - c. Kursus Komputer di Proactive Computer Course Yogyakarta (1999)
 - d. Pelatihan Keadvokatan Sarjana Syari'ah di Surabaya (2004)

Riwayat Pekerjaan

1. Guru TK, MI dan MTs. Nurul Jadiid Sumenep (1997-1999)
2. Direktur TPA Miftahul Hasanah Pengok Blok C Yogyakarta (2000)
3. Guru SD Muhammadiyah Saren di Langensari Yogyakarta (2001)
4. Tutor bahasa Inggris Lembaga kursus New Gama Yogyakarta (2002)
5. Guru SD Bhayangkara I (2003)
6. Pengajar bahasa Inggris program DPP Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga (2005-2007)
7. Pengajar bahasa Inggris program DPP Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2006-2007)
8. Staff bagian kemahasiswaan (PD III Fakultas Syari'ah UIN Su-ka)

Organisasi

1. Ketua BEMJ PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2001-2003)
2. Ketua Departemen B. Inggris UKM Bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga (2002-2003)
3. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003-2004)
4. Kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

5. Pengurus Pusat FORMASI (Forum Mahasiswa Syari'ah se-Indonesia) 2003
6. Sekjend IMABA (Ikatan Mahasiswa-Santri PP. Bata-Bata Pamekasan) 2005-2009
7. Anggota Forum Silaturrahim Keluarga Cendekiawan Madura Yogyakarta

Karya Ilmiah

1. *Islam dan Poligami* (tarjamahan), Jurnal Mazhabuna Nomor 2/Tahun I/2004
2. *Kegagalan Supremasi Hukum di Indonesia (Kasus Pembebasan Akbar Tanjung)* Majalah Advokasia Nomor 10/Tahun X/2004
3. *Politik Hukum Islam Era Reformasi*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 38. No. I, Th. 2004
4. "The Struggle Strategies of Post New Order Islamic Politic in Indonesia: A Comparative Study of PKB and PK". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004
5. *Urgensi Talfiq Dalam Perumusan Fiqh Al Qanun*, jurnal 'Mazhabuna' Nomor 3/Tahun II/2005
6. Tarjamah *Boss Talk*. Inspirasi Buku Utama, 2005
7. "Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil Penelitian bersama Drs. Kholid Zulfa, M. Si. di Lemlit UIN Sunan Kalijaga, 2005
8. *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Politiea Press, 2007
9. *Pergumulan Tak Kunjung Usai: Islam dan Negara Bangsa di Indonesia*. Yogyakarta: Politiea Press, 2007